

	News Title : Bursa Aset Kripto Indonesia Satu-satunya di Dunia	
	Media Name : niaga.asia	Journalist : Intoniswan
	Publish Date : 13 January 2024	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 1,500,000
	Resources : Kasan (Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti))	Ads Value : 500,000
	Section/Rubrication : Kripto	Topic : Bursa CPO

Bursa Aset Kripto Indonesia Satu-satunya di Dunia

© 13 Januari 2024

[f](#)
[t](#)
[w](#)
[s](#)
 Bagikan:



Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan didampingi Pelaksana Tugas Kepala Bappebti Didik Noordiatmoko dan Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Asakrindo) Teguh Kurniawan Harmanda membuka acara Bulan Literasi Kripto Tahun 2023 yang berlangsung di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (2/2/2023).

BANDUNG.NIAGA.ASIA – Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kasan mengatakan, terkait ekosistem aset kripto, Bappebti telah membentuk bursa aset kripto, lembaga klining aset kripto, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto (depository) yang diresmikan pada 28 Juli 2023.

"Bursa aset kripto di Indonesia merupakan satu-satunya di dunia," kata Kasan saat membuka Outlook Perdagangan Berjangka Komoditi dan Rapat Kerja Bappebti 2024 di Bandung, Jawa Barat, Kamis (11/1).

Pembentukan ekosistem tersebut mengacu pada Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 13/2022 tentang Perubahan Atas Perba Nomor 8/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Kasan menekankan, pembentukan ekosistem aset kripto merupakan bukti pemerintah hadir dalam upaya perlindungan konsumen. Hal ini sekaligus memberikan kepastian berusaha bagi industri aset kripto.

"Pada Januari-November 2023, total nilai transaksi kripto tercatat sebesar Rp122 triliun. Adapun jumlah pelanggan aset kripto sejak diaturnya aset kripto oleh Bappebti sampai November 2023 mencapai 18,25 juta pelanggan sementara pedagang aset kripto yang telah memperoleh Tanda Daftar sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) di Bappebti sebanyak 33 perusahaan," paparnya.



Ilustrasi

Menurut Kasan lagi, dengan adanya UU No 4/2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan, kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan aset kripto dan derivatif keuangan akan beralih dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) pada Januari 2025.

"Saat ini, OJK, BI, Kementerian Keuangan, dan Bappebti sedang tahap finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)," ungkapnya.

Perdagangan aset kripto diprediksi tumbuh positif seiring dengan halving Bitcoin yang akan terjadi pada 2024. Untuk itu, ekosistem yang telah dibangun harus berjalan dan menumbuhkan transaksi, 33 CPFAK didorong menjadi Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK), mengembangkan aset kripto lokal, membentuk Komite Aset Kripto, menyelesaikan RPP turunan UU P2SK, serta memastikan peralihan kewenangan dari Bappebti ke OJK dan BI tidak menimbulkan guncangan bagi industri aset kripto.